



**Book Chapter of Proceedings  
Journey-Liaison Academia and Society**

Availabel Online: <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS>

---

**Moderasi Beragama dalam Bernegara di Indonesia dan  
Singapura**

***Religious Moderation in the State in Indonesia and Singapore***

**Nurul Izzah**

**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

***Corresponding author : Nurul0331223027@uinsu.ac.id***

---

**Abstrak**

Moderasi beragama begitu penting ketika masyarakat disebuah negara merupakan masyarakat yang plural. Perbedaan agama di masyarakat yang plural cenderung terjadi gesekan dan konflik yang mengganggu stabilitas negara. Tulisan ini berupaya melihat moderasi beragama yang ada di dua negara dikawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia dan Singapura yang dikenal dunia sebagai negara yang pluralistik. Metode yang digunakan adalah *literature review* dengan teknik meta analisis. Melalui tulisan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa baik Indonesia dan Singapura adalah sama-sama negara yang tidak menjadikan agama sebagai konstitusi, namun memberikan ruang untuk warga negaranya untuk menganut dan menjalankan kepercayaan masing-masing sepanjang tidak mengganggu stabilitas negara. Kemudian moderasi beragama di kedua negara ada campur tangan pemerintah dengan menetapkan kebijakan-kebijakan yang mendorong masyarakat yang plural untuk tetap selaras menciptakan harmonisasi dalam bermasyarakat dan bernegara.

**Kata Kunci:** Moderasi, Plural, Agama

**Abstract**

*When a nation's society is a plural society, religious moderation is crucial. In a multicultural community, religious differences frequently lead to friction and conflict, which threatens the nation's stability. This essay examines the degree of religious tolerance that exists in Singapore and Indonesia, two Southeast Asian nations that are well-known for their tolerance of religious diversity. The approach is a meta-analysis of the literature review. Through this essay, it is possible to draw the conclusion that Singapore and Indonesia both allow their residents the freedom to adhere to and practice their various religions, so long as doing so does not jeopardize the peace in the nation. The government then intervenes in religious moderation in both countries by putting policies in place that support a plural society remaining in harmony in order to create harmony in society and as a state.*

**Keywords:** Moderation, Plural, Religion

## PENDAHULUAN

Kehidupan sosial yang sehat adalah kehidupan yang saling menghargai hal yang berbeda dengan individu lainnya, menghargai aturan dan pembatasan, menilai kebenaran dan keadilan sebagai sesuatu yang suci. Mereka saling memahami apa yang diinginkan orang lain. Setiap individu mempunyai kewajiban terhadap masyarakatnya. Dalam agama, dijelaskan hak dan kewajiban setiap individu. Tidak ada sesuatu yang melebihi agama dalam hal menghargai kebajikan, menganggap suci keadilan, menyentuh hati sesamanya, menciptakan saling percaya (Makhbulloh, 2013). Manfaat agama secara sosial berkaitan dengan relasi-relasi kehidupan bermasyarakat baik seagama maupun berbeda agama. Manusia-manusia yang beragama seharusnya tidak menimbulkan masalah dalam tata kehidupan sosial. Hidup tampak rukun dan harmonis, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, berwasiat tentang kebenaran dan kesabaran.

Agama juga merupakan fondasi dalam mengatur masyarakat yang demokratis dan menjaga otonomi individu maupun kelompok dengan konsep *civil society* yang berkelanjutan dan menghindari ketidakpantasan yang akan menyerang kekuasaan negara (Administration of Muslim Act, 1999). Agama sendiri untuk beberapa kawasan di belahan dunia ini adalah penting dan sakral, sehingga kedudukan Agama dalam kehidupan sangatlah dijunjung tinggi karena bagi penganutnya sebagai landasan dan pandangan hidup di dunia. Tidak mengherankan ketika Agama menjadi kekuatan dan diperjuangkan oleh penganutnya.

Salah satu kawasan yang kental dengan keagamaan adalah Asia Tenggara, negara-negara di kawasan ini erat dengan keagamaan ataupun kepercayaan yang telah turun-temurun diturunkan oleh nenek moyang mereka dan sampai sekarang masih terjaga kelestariannya. Beberapa negara-negara di Asia Tenggara adalah negara-negara serumpun yang memiliki kemiripan ras, etnis maupun keagamaan. Sebut saja Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam yang memiliki kemiripan dikarenakan berada pada letak geografis negara yang berdekatan. Perkembangan sejarah juga menjadikan negara-negara ini menjadi negara-negara yang memiliki keberagaman etnis maupun agama.

Keberagaman, majemuk, dan pluralitas sering dirujuk pada masyarakat yang memiliki keberagaman akan etnis, suku, ras ataupun agama yang tinggal dalam sebuah kawasan yang disebut negara. Keberagaman juga terepresentasi oleh budaya, tradisi, adat-istiadat ataupun bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakatnya. Keberagaman menjadikan sebuah negara unik dan kaya dan terkadang keindahan muncul ketika keberagaman dapat selaras dalam sebuah keharmonian. Namun keberagaman juga menjadi ancaman bagi suatu negara ketika, keberagaman ataupun perbedaan tidak terjadi keselarasan ditengah-tengah

masyarakat. Salah satu keberagaman yang paling rawan akan konflik ataupun gesekan di tengah-tengah masyarakat adalah keberagaman agama.

Keberadaan kelompok penganut agama menimbulkan pola-pola kultural tertentu. Sementara itu, perbedaan dalam pola-pola perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai dan norma-norma agama masing-masing kelompok penganut agama sangat menimbulkan kerawanan sosial tertentu. Kerawanan sosial tersebut yang paling mutakhir adalah gejala konflik antar penganut agama dan kepercayaan. Agama bukan saja menjadi perekat dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi juga menyimpan potensi perpecahan. Perpecahan akan muncul ketika masing-masing kelompok saling mengukuhkan bahwa agama dan kepercayaan yang dianutnya adalah paling benar, dan menganggap agama dan kepercayaan yang dianut kelompok lain sesat.

Belakangan permasalahan sosial terkait benturan keagamaan menyeruak di tengah-tengah masyarakat. Perbedaan agama terkadang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu sehingga menimbulkan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat. Keberagaman baik agama, etnis, adat dan budaya memang menjadi kekayaan dan keunikan sendiri bagi sebuah negara. Sehingga perlu kiranya menciptakan keharmonisan ditengah-tengah perbedaan.

Bagaimana caranya keberagaman agama membawa kemaslahatan dan bukan menjadi persoalan bangsa. Penerimaan satu sama lain haruslah sepenuh hati dan genuinitas. Hidup bersama dan menumbuhkan serta menjaga kebersamaan. Hidup bersama bukan hanya sosial dan praktis, tetapi juga harus secara teologis. Sehingga menciptakan bagaimana keberagaman membawa manfaat. Kebersamaan membawa manfaat dicapai dari dialog antar penganut agama tersebut dalam bentuk konsensus antar penganut agama. Ini menekankan kesatuan dari berbagai kelompok agama yang berjiwa pluralis.

Agama di kawasan Asia Tenggara memiliki peranan penting dalam mengkonstruksi politik negara, legitimasi politik, integrasi nasional dan tekanan internal (Tan, 2007). Pendapat ini menjelaskan bahwa keagamaan memiliki peranan penting dalam bernegara dikawasan negara-negara Asia Tenggara. Agama juga diindikasikan dalam kedekatan terhadap politik, sehingga tidak mengherankan Agama menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah yang sedang menjalankan negaranya. Disisi lain agama juga bisa mengurangi pembangunan nasional ketika dia bertentangan dengan kepentingan, seperti yang berfokus pada urban dan pembangunan ekonomi.

Solusi yang bisa ditawarkan era ini dalam menyikapi perbedaan agama ditengah kemajemukan masyarakat adalah dengan konsep “moderasi beragama”. Secara sederhana moderasi beragama adalah bagaimana cara pandang, sikap dan perilaku seseorang berdasarkan agama yang dianutnya. Meyakini agama sendiri dan mempraktikkannya namun tetap menghormati dan menghargai adanya agama lain dan penganutnya untuk meyakini apa yang mereka percayai, tanpa harus

membenarkannya. Moderasi Agama diharapkan mampu menjadikan harmonisasi bagi kelompok-kelompok agama yang berbeda untuk hidup berdampingan dengan tentram damai dan penuh kasih.

Dalam kesempatan ini penulis akan mencoba menjabarkan bagaimana moderasi beragama yang terjadi di dua negara yang ada di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia dan Singapura. Kedua negara ini dikenal dengan masyarakatnya yang majemuk dan pluralis. Selain itu kedua negara ini disebut-sebut sebagai negara yang sukses dalam menjaga keharmonisan ditengah perbedaan-perbedaan yang ada di negaranya.

Indonesia dan Singapura keduanya bukanlah negara yang menjadikan dirinya sebagai negara Agama ataupun teokratis. Singapura adalah negara sekuler dimana dengan sangat jelas memisahkan urusan agama sebagai urusan ranah pribadi warga negaranya, sehingga urusan agama tidak boleh dilibatkan dalam urusan bernegara dan politik di negeri Singapura. Namun Singapura mengizinkan warga negaranya untuk memilih agama yang ingin mereka anut dan menjalankan ajarannya sepanjang tidak mengancam stabilitas negara. Sedangkan Indonesia memposisikan diri ditengah-tengah antara negara agama dan sekuler. Indonesia bukanlah negara agama dan bukan juga negara sekuler. Melainkan negara yang mengakui adanya keagamaan dan pentingnya agama bagi warga negaranya. Sehingga menjadikan Indonesia bukanlah negara agama tetapi dapat dipastikan negara yang beragama.

Kedua negara ini menarik untuk dibahas terkait bagaimana moderasi beragama berjalan di kedua negara ini, mengingat kedua negara ini adalah dua negara dengan keberagaman yang tinggi di kawasan Asia Tenggara, inilah alasan mendasar yang menjadikan tulisan ini dibuat dan menjadi focus permasalahan yang akan dijabarkan dalam tulisan ini.

## **METODE PENULISAN**

Penulisan ini menggunakan teknik *literature review*, yaitu pengumpulan data dan fakta dengan pendekatan kualitatif berbasis teks yang menghimpun data dan fakta dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, ataupun sumber-sumber lain baik buku jurnal, naskah akademis ataupun pemberitaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data dan fakta yang terkumpul kemudian dirangkum untuk mengidentifikasi serta menemukan korelasinya (Rowley, 2004).

Penulisan hasil penelitian berbasis teks digunakan untuk mencoba menganalisis data, fakta maupun temuan-temuan yang didapatkan dari penelitian yang sebelumnya. Selanjutnya di analisis dan dikombinasikan dalam upaya menghasilkan kesimpulan secara jelas dan obyektif (Crowther, 2010). Kemudian dilanjutkan dengan teknik meta analisis yaitu menyajikan data dari berbagai sumber yang berbeda untuk menjadi lebih sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia dan Singapura adalah dua negara dengan kemajemukan yang tinggi. Sehingga penting bagi kedua negara ini memastikan dalam kehidupan bermasyarakatnya tidak terjadi gesekan ataupun konflik terutama konflik atas perbedaan agama yang mengancam stabilitas negara. Indonesia adalah negara dan populasi islam terbesar di dunia sedangkan Singapura adalah dengan penduduk muslim yang minoritas walaupun secara statistik Singapura penduduk muslim ada di populasi terbesar kedua yang dianut warganya. Kedua negara sama-sama menolak untuk menyebut sebagai negara agama, dikarenakan kedua negara lebih memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk menjalankan kepercayaan yang mereka anut sepanjang tidak mengancam kedudukan negara.

Singapura sendiri awalnya adalah negara dibawah kedudukan Kerajaan Inggris. Kemudian di tahun 1963 barulah Singapura merdeka setelah diberikan oleh Inggris dengan bentuk negara Republik. Namun Singapura sempat termasuk dalam negara federasi Malaysia, hingga pada akhirnya keluar di tahun 1965 dan menjadi negara yang mandiri. Penduduk Singapura sendiri hingga juli 2023 berjumlah 6.017.317 jiwa (<https://www.worldometers.info/world-population/singapore-population/>). Sedangkan Indonesia adalah negara yang sebelumnya dijajah oleh belanda dan diduduki oleh Jepang hingga akhirnya merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 278,69 juta jiwa yang menjadikan Indonesia menjadi negara keempat dengan penduduk terbesar di dunia (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/penduduk-indonesia-tembus-278-juta-jiwa-hingga-pertengahan>).

Kondisi ini menjadikan kedua negara ini menjadi negara yang memiliki keberagaman didalam hidup bernegara dan masyarakat. Singapura awalnya adalah negara persinggahan pelabuhan ataupun kota kecil yang berfokus pada pelabuhan dan peringgahan menjadikan negara ini didatangi oleh berbagai macam etnis yang tentunya membawa kepercayaan yang perlahan-lahan terakulturasi dengan penduduk asli yang ada di Singapura. Tak ubahnya dengan Singapura, Indonesia dari awal telah dipenuhi dengan keberagaman yang telah ada sejak zaman nenek moyang yang terus diwariskan dan dilestarikan. Sehingga tidak mengherankan kedua negara ini juga memiliki keberagaman soal keagamaan. Berikut dibawah ini akan dijabarkan bagaimana moderasi beragama yang ada di Indonesia dan Singapura berlangsung, dan bagaimana moderasi beragama dapat terjaga di kedua negara Asia Tenggara ini yang sering dijadikan bahan rujukan oleh negara-negara lain terkait kemajemukan dan moderasi beragama dapat tumbuh di masyarakatnya.

## **Moderasi Beragama di Indonesia**

Setidaknya ada enam agama di Indonesia yang memiliki banyak penganutnya, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Namun tidak bisa ditolak bahwa masih banyak kepercayaan yang diikuti berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang diwariskan oleh leluhur. Hal ini juga menunjukkan bahwa agama lokal yang berdasarkan kepercayaan leluhur berjumlah ratusan. Kondisi ini menjadikan Indonesia adalah bangsa yang beragama sehingga akan banyak pandangan, keyakinan, pendapat serta kepentingan masing-masing yang termasuk didalamnya perbedaan keagamaan.

Berdasarkan hasil sensus yang dilakukan di Indonesia agama Islam adalah agama yang terbesar yaitu 241,7 juta jiwa masyarakat Indonesia beragama Islam yakni 87,02 persen. Diikuti oleh penganut agama Kristen sebesar 7,43 persen atau sebanyak 20,65 juta jiwa, Katolik sebanyak 8,5 juta jiwa atau 3,06 persen, Hindu sebanyak 4,69 juta jiwa atau 1,69 persen, agama Budha sebanyak 2,02 juta jiwa atau 0,73 persen, Konghucu sebanyak 74.899 0,03 persen dan agama lainnya sebesar 0,04 persen yaitu 117.412 jiwa (<https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>).

Moderasi beragama di Indonesia lebih bercorak bagaimana memperkuat dan memperluas identitas nasional sebagai negara demokratis dalam tatanan masyarakat internasional. Tendensi Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi lebih menekankan upaya terhadap pendekatan diri terhadap negara-negara demokrasi maju.

Moderasi Indonesia erat kaitannya dengan Islam moderat ini dikarenakan jumlah penduduk yang beragama Islam di Indonesia lebih besar dibandingkan penganut agama lain. Dan tidak bisa dinafikan bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar di Dunia. Sehingga menjadikan moderasi agama akan mengaitkan dengan kehidupan komunitas Islam di Indonesia. Sejatinya warga muslim Indonesia telah menjalankan pluralitas agama semenjak Pancasila sebagai landasan sekaligus dasar negara yang menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. UUD 1945 yang ditetapkan sebagai konstitusi nasional dan bukannya konstitusi syariah mengingat populasi muslim yang dominan di Indonesia. Namun inilah yang menjadikan awal mula pluralistik dikembangkan di Indonesia yang bertujuan antar umat beragama dapat hidup berdampingan di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Moderasi beragama sendiri masuk dalam perhatian khusus oleh pemerintah Indonesia, dimana moderasi beragama masuk kedalam RPJMN ataupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Di Indonesia sendiri pada zaman orde baru konflik agama tidak menjadi permasalahan yang menjadi fokus utama, tercatat melainkan persolan

pembangunan dan ekonomi yang menjadi fokus pemerintah. Hanya sebanyak 9 kasus saja terkait penistaan agama (Pratomo, 2016). Setelah masa orde baru masuk masa reformasi ada kenaikan kasus terkait kasus keagamaan sebanyak 88 kasus, sebuah catatan yang dirilis sejak 1965 hingga tahun 2017 hanya 97 kasus yang terkait keagamaan yang terjadi di wilayah Indonesia (Institut, 2019).

Effendy (1998) menjelaskan bahwa keberadaan agama disejajarkan dengan negara sebagai bentuk peradaban. Sehingga menjadikan persoalan agama mulai terakomodir kedalam urusan kenegaraan (Effendy, 1998). Ada empat pola yang terbentuk pada masa itu: pertama, Struktural dimana aktivis serta cendekiawan muslim mulai masuk kedalam birokrasi negara ataupun kursi legislatif. Kedua, Infrastruktur negara secara aktif mendukung pembangunan rumah-rumah ibadah seperti pembangunan masjid. Ketiga, kultural yang mana kebiasaan ataupun hal-hal yang identik atas suatu agama mulai dapat diterima diruang publik. Keempat, legislatif dimana peraturan hukum mulai memasukkan aspek hukum keagamaan seperti aspek hukum islam walaupun hanya berlaku bagi umat Islam saja.

Sa'dun (1999) menjelaskan bahwa permasalahan pribumi dan non-pribumi telah bergeser menjadi membagi kelompok Islam dan bukan Islam (Sa'dun, 1999). Sehingga sebelum reformasi masalah keagamaan tidak menjadi ancaman bagi negara sehingga kata moderasi beragama belum dikenal saat itu. Kebebasan berpendapat yang muncul pada era reformasi memiliki berbagai dampak, intoleransi mulai muncul ketika adanya kebebasan berpendapat, masih belum adanya regulasi yang jelas, pesatnya perkembangan teknologi komunikasi menjadi pupuk subur munculnya intoleransi yang terjadi di Indonesia.

Pemerintah Indonesia menyikapi kondisi perbedaan agama yang beragam ini, menganggap pentingnya sebuah upaya yang bertujuan menciptakan kerukunan, ketentraman, kedamaian dalam kehidupan beragama yang berdampingan. Sehingga pilihan solutif yang digagas oleh pemerintah Indonesia adalah dengan Moderasi Agama. Hal ini agar masyarakat Indonesia dapat memahami dan menerima perbedaan yang ada sehingga terhindar dari radikalisme, ekstremisme maupun tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kestabilan kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

Indonesia lewat Kementerian Agama Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang bertanggungjawab menciptakan moderasi beragama dalam upaya menimbulkan harmonisasi. Kementerian agama sendiri mengeluarkan indikator moderasi beragama di tahun 2020:

1. Komitmen Kebangsaan. Indikator pertama ini merujuk pada bagaimana masyarakat Indonesia dapat menerima prinsip-prinsip beragama dalam berbangsa sesuai dengan konstitusi yang diakuin Indonesia yaitu UUD 1945 serta turunan paeraturan dibawahnya. Komitemen kebangsaan juga dapat diartikan sebagai wujud akan cinta tanah air bagi mayasrakat Indonesia.

2. Toleransi. Indikator kedua ini dapat dilihat dengan bagaimana masyarakat Indonesia dapat memahami perbedaan tanpa menjadikannya perselisihan, saling menghormati, memberikan ruang bagi kelompok agama lain dalam berkeyakinan, beribadat sesuai dengan keyakinannya, menyampaikan pendapat dan mengakui adanya kesetaraan dan ada rasa untuk berkerja sama.
3. Anti Kekerasan. Indikator ketiga ini menginginkan masyarakat Indonesia yang menolak kekerasan baik verbal maupun fisik dan beradaptasi atas perubahan yang ada.
4. Penerimaan terhadap tradisi. Mengingat keragaman tradisi lokal yang ada di Indonesia, maka diharapkan masyarakat mampu menerima tradisi-tradisi yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Moderasi Agama yang dijalankan oleh Kementerian Agama juga memberikan muatan pesan untuk membentuk harmonisasi beragama di Indonesia:

1. Menjaga keselamatan jiwa. Umat beragama memiliki kewajiban dalam menjaga keselamatan baik pribadi maupun kelompok masyarakat.
2. Menjunjung tinggi keadaban mulia. Masyarakat Indonesia diharapkan dengan ajaran agama yang dianutnya dapat menjunjung pandangan hidup dengan tetap mengedepankan ke Indonesiaan.
3. Menghormati harkat martabat kemanusiaan. Agama diharapkan mampu menjadi landasan bagaimana manusia memperlakukan manusia lainnya untuk menciptakan kemaslahatan bersama.
4. Memperkuat nilai moderat. Masyarakat Indonesia yang beragam agama hendaknya berupaya dalam mencari jalan tengah demi kebaikan bersama.
5. Mewujudkan perdamaian. Perdamaian menjadi tujuan penting dalam moderasi agama menebarkan kebaikan, kedamaian dan kebajikan serta mengatasi konflik yang sesuai dengan berpedoman pada konstitusi yang berlaku di Indonesia.
6. Menghargai kemajemukan. Moderasi agama mendorong bagaimana masyarakat menerima keberagaman sebagai anugerah dan terbuka atas perbedaan sebagai bentuk keunikan.
7. Menaati komitmen berbangsa. Moderasi agama menginginkan masyarakat untuk menjadikan konstitusi sebagai panduan dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan tentunya beragama.

Moderasi Agama di Indonesia masih terus digalakkan oleh pemerintah, bahkan pemerintah masih menganggap perlunya masyarakat Indonesia untuk kembali diperkenalkan ataupun disosialisasikan kembali apa esensi dari moderasi.

Kementerian Agama dalam model moderasi agamanya ada membahas terkait kesalahpahaman konsep moderasi agama itu sendiri dikalangan masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat Indonesia menganggap bahwa sikap moderat cenderung menunjukkan bahwa seseorang tidak punya pendirian terhadap agama yang dianutnya, ataupun tidak benar-benar sungguh menjalankan ajaran agamanya. Sensitifitas, kurang kepedulian, sering disematkan pada kelompok-kelompok agama yang mencoba menjalankan konsep moderasi beragama. Terlebih moderasi sering disalah artikan pada konsep liberal dan tidak mengindahkan prinsip-prinsip dasar yang telah tertulis dalam teks agama.

Hal inilah yang menjadikan pemerintah menghadirkan diri ataupun mengambil kebijakan untuk terlibat aktif dalam menyebarkan ataupun menumbuhkan konsep moderasi agama ditengah masyarakat yang multikultural dan plural. Tujuannya adalah mendudukkan konsep moderasi agama adalah bukan sebagai penyebab seseorang tidak menjalankan ajaran keagamaannya secara fasih, melainkan mencoba menekankan prinsip yang adil serta berimbang, selama tidak bertentangan dengan ajaran kebenaran agama. Dengan moderasi agama harmonisasi ditengah perbedaan agama yang ada dapat terbentuk dan terjaga.

Moderasi beragama dapat terjadi dalam tiga syarat yaitu, memiliki ilmu ataupun berilmu, mampu mengendalikan emosi ataupun berbudi dan selalu berhati-hati. Di Indonesia sendiri moderasi beragama sering di anggap hanya untuk menjadi pemecah masalah bagi kalangan masyarakat yang konservatif atau yang dikenal dengan ekstrem kanan. Sementara permasalahan keagamaan ditengah masyarakat yang plural dan pengaruh besar dari dampaknya perkembangan teknologi yang pesat, paham liberal juga tumbuh menjadi permasalahan dalam perilaku agama di Indonesia sehingga moderasi agama berupaya untuk menjadi penengah diantara dua kutub yang kapan saja bisa terjadi gesekan dan mengancam stabilitas nasional.

Indonesia sebagai negara yang plural dan multikulturalisme sejauh ini dianggap mampu untuk menyelaraskan perbedaan dan keadilan bagi agama-agama yang ada di Indonesia serta menempatkan diposisi yang sama dihadapan negara. Salah satu bukti yang dapat terlihat adalah dimana Indonesia sebagai negara memberikan hari libur nasional pada perayaan-perayaan hari besar agama yang ada di Indonesia, seperti Islam, katolik, Kristen, Budha, Hindu maupun Konghucu. Selain itu tradisi, adat budaya masih menjadi perhatian pemerintah untuk dijaga serta dilestarikan selama tidak mengganggu ketenteraman dalam kehidupan masyarakat yang beragama ditengah perbedaan agama yang ada.

Ketika kita mendalami bagaimana masyarakat Indonesia menjalankan moderasi beragama beberapa hal unik akan kita temui. Sebelum mengenal kata moderasi, masyarakat Indonesia telah mempraktikan bagaimana moderasi itu telah berjalan. Seperti masyarakat yang tidak anti dengan pola motif ataupun corak dari etnis lain pada rumah-rumah ibadah mereka. Hal ini terjadi ketika penyebaran

suatu agama ajaran tertentu masuk dalam kesekelompok budaya tertentu sehingga terjadi peleburan untuk dapat diterimanya sebuah ajaran pada kelompok tertentu. Contohnya seperti 10 masjid yang bercorak Tionghoa yang ada di Indonesia ini ([https://www.liputan6.com/islami/read/4266133/10-masjid-bercorak-tionghoa-di-indonesia-unik-dan-khas#google\\_vignette](https://www.liputan6.com/islami/read/4266133/10-masjid-bercorak-tionghoa-di-indonesia-unik-dan-khas#google_vignette)): Masjid Lautze yang ada di Jakarta, Masjid Lautze 2 yang ada di Bandung kedua masjid ini dikelola oleh YHKO ataupun Yayasan Haji Karim Oei. Kedua masjid ini didominasi dengan corak-corak tionghoa yang khas dengan warna merah serta kining dan ornament oriental lainnya seperti lampu. Selain itu ada Masjid Cheng Ho yang ada di Surabaya, Masjid Cheng Ho di Palembang, Masjid Cheng Ho di Purbalingga, Masjid Tan Kok Liong yang ada di Bogor, Masjid Al Imtizaj, yang ada di Bandung, Masjid KH. M Bedjo Dermoleksono yang ada di Malang, Masjid Siti Djirzanah di Yogyakarta, Masjid Al Mahdi di Magelang. Masjid-masjid yang disebutkan sebelumnya adalah merupakan bukti dimana akulturasi budaya dan kepercayaan dapat terjadi sehingga menimbulkan harmonisasi ditengah perbedaan tanpa adanya menghakimi mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk.

Kisah-kisah toleransi banyak terjadi di Indonesia, salah satunya ditahun 2017 dan 2019, dimana kisah toleransi menyebarkan untuk diteladani bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menghadapi kehidupan berdampingan ditengah masyarakat yang heterogen guna menciptakan harmonisasi dilingkungan sosial yang kondusif. Gereja Katedral Jakarta dan Masjid Istiqlal dimana gereja Katedral mengubah jadwal misa ketika bertepatan dengan hari raya umat islam, dan mengizinkan masyarakat muslim menggunakan halaman Gereja Katedral untuk lahan parkir kendaraan sepanjang masyarakat muslim melaksanakan shalat hari raya (<https://travel.kompas.com/read/2019/12/26/180400427/indahnyatoleransimasjid-istiqlal-dan-gereja-katedral>). Perilaku dan tindakan ini menunjukkan adanya toleransi beragama yang tumbuh ditengah—tengah masyarakat Indonesia. Sehingga tak heran juga ketika Masjid dan Gereja ini dikatakan sebagai salah satu simbol indahnyatoleransi di Indonesia. Perilaku yang dilakukan oleh Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal juga menggambarkan saling tolong dan humanis masyarakat di Indonesia ditengah perbedaan, perbedaan tidak memisahkan melainkan bersama menjembatani perbedaan dengan tetap pada prinsip keagamaan masing-masing dan tidak melunturkan keimanan tetapi tetap harmonis berdampingan.

Contoh lain terkait moderasi beragama yang ada di Indonesia adalah kita bisa merujuk pada desa Keramas yang ada di Provinsi Bali tepatnya di kecamatan Gianyar yang dikenal dengan Kampung Sindu. Kerukunan umat beragama terjadi antara masyarakat Islam dan masyarakat Hindu Bali. Kedua masyarakat yang berbeda agama ini akan saling menghormati pelaksanaan ibadah masing-masing, dimana ketika masyarakat Hindu merayakan hari raya Nyepi maka masyarakat Islam akan ikut serta dalam menyumbangkan makanan dan minuman serta

mengikuti peraturan untuk tidak berkeliaran selama hari raya Nyepi berlangsung. Begitu juga sebaliknya, ketika masyarakat muslim sedang menjalankan ibadah puasa maka masyarakat Hindu akan mengeluarkan larangan untuk makan dan minum dihadapan masyarakat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa, dan ketika perayaan hari raya idul fitri maka masyarakat Hindu akan bersilaturahmi kerumah-rumah masyarakat Islam.

Interaksi sosial yang terbentuk pada masyarakat kampung sindu yaitu masyarakat Islam dan Hindu disebut sebagai fondasi dasar dalam bermasyarakat atas azas multikulturalisme (Ardhi, 2013). Apa yang terjadi di Kampung Sindu Keramas Gianyar Bali menampilkan 3 alasan kuat sehingga moderasi beragama dapat terbentuk di desa ini: Pertama, toleransi beragama yang tinggi ditengah-tengah masyarakat kampung Sindu, yang tampak pada saat masing-masing agama merayakan hari-hari besar keagamaan, kedua kelompok agama saling dukung dan saling menghormati perayaan masing-masing. Kedua, Hubungan sosial yang terbentuk ditengah-tengah masyarakat Kampung Sindu sangat erat, dimana sejarah menunjukkan bahwa seluruh masyarakat puri diayomi dengan baik, dan sekarang telah terjadi perkawinan silang yang menjadikan peleburan ditengah-tengah masyarakat Kampung Sindu, selain itu adanya rasa timbal balik dalam behubungan masyarakat meningkatkan keeratan sosial yang ada. Ketiga, budaya yang terharmonisasi, warga Kampung Sindu menggunakan bahasa Bali Halus yang awalnya digunakan oleh pihak Puri, yang notabeneanya masyarakat Kampung Sindu yang pendatang dengan leluasa dan meleburkan diri dengan budaya lokal, dan sudah sangat fasih berbahasa Bali halus (Widya, 2022) .

Tentu pembahasan keagamaan di Indonesia tidak sepenuhnya sempurna ataupun bebas dari konflik. Indonesia juga mengalami kasus-kasus gesekan keagamaan hingga sekarang. Permasalahan keagamaan sejak tahun 2010 mulai dicatat oleh negara lewat Kementerian Agama Republik Indonesia, adapun isu-isu yang menjadi permasalahan keagamaan yang ada di Indonesia adalah terkait gerakan keagamaan, paham, aliran, pembangunan rumah ibadah, ekstremisme, radikalisme maupun terorisme. Permasalahan-permasalahan inilah yang mengakibatkan perlunya peran negara dalam mendukung masyarakat untuk menciptakan harmonisasi. Namun terkadang bias sering terjadi antara negara dengan kelompok agama tertentu, dimana tidak terjadinya komunikasi yang harmonis antara negara dan penganut agama. Dimana negara terkesan mengintervensi ajaran agama tertentu. Sehingga hal seperti ini juga menjadikan konflik yang lebih berkepanjangan dan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap negara ataupun pemerintah. Tak bisa dipungkiri di Indonesia akhir-akhir ini, isu agama sering disusupi dengan kepentingan politik oleh segelintir kumpulan orang yang tidak bertanggungjawab yang menginginkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat yang plural dengan perbedaan agama ini.

Berikut ini beberapa konflik-konflik agama besar yang menjadi sorotan yang pernah terjadi di Indonesia:

1. Konflik Poso

Konflik ini adalah termasuk konflik agama yang serius yang pernah terjadi di Indonesia, karena sangat sulit untuk mendapatkan penyelesaian konflik ini. Konflik Poso terjadi sebanyak tiga kali yaitu ditahun 1999, April tahun 2000 dan Mei sampai Juni tahun 2000.

2. Konflik Ambon

Konflik ini terjadi ditahun 1999, dimana kasus ini bermula aksi pemalakan yang dilakukan salah satu kelompok agama, dan ditambah dengan penyebaran isu-isu negatif yang membarengi konflik ini. Tercatat 12 orang tewas dan ratusan orang terluka.

3. Konflik Tolikara

Konflik ini terjadi ditahun 2015 antara Islam dan Nasrani. Dimulai dengan umat Nasrani yang membakar masjid ketika salat Idul Fitri. Peristiwa ini mengakibatkan 96 rumah warga muslim hangus dibakar dan dua orang tewas.

4. Konflik Lampung

Konflik ini terjadi antara desa Agom dan desa Balinuraga, antara umat Budha dan Islam. Konflik terjadi gadis dari desa Agom (Islam) digoda oleh pemuda asal Balinuraga (Budha). Yang akhirnya merembet menjadi permalahan yang lebih besar dan mengikutsertakan banyak orang yang saling menyerang.

Kasus-kasus kekerasan diatas adalah kasus-kasus keagamaan yang menyorot banyak perhatian publik. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mencegah konflik-konflik keagamaan tidak terulang kembali adalah toleransi. Toleransi merujuk pada kerelaan masyarakat akan adanya perbedaan ditengah-tengah kehidupan mereka dan mencoba untuk hidup berdampingan dan harmonis. Masyarakat Indonesia seyogyanya harus memahami bahwa pertemuan keberagaman agama ditengah peradaban manusia ketika kurang terbuka akan menimbulkan tensi yang akan mengarah pada perang keyakinan sehingga terjadi klaim agama kita benar dan agama orang lain salah. Pendapat seperti ini hanya akan merugikan masyarakat sendiri karena banyak yang harus mereka korbakan. Masyarakat Indonesia diajak untuk lebih terbuka dalam artian menerima perbedaan agama dan mau hidup berdampingan tanpa menghakimi agama orang lain sebagai agama yang benar dan agama yang salah. Ruang publik dimanfaatkan bukan hanya sekedar saling sapa melainkan menimbulkan sifat tolong menolong dan gotong royong sehingga memunculkan rasa humanisme tanpa mencederai keimanan masing-masing. Konsep inilah yang disebut dengan konsep moderasi

agama, yang berupaya menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat agama yang moderat.

### **Moderasi Beragama di Singapura**

Singapura adalah bangsa yang memisahkan agama dengan urusan negara dan politik. Pemerintahan Singapura tidak mendorong masyarakatnya untuk memeluk suatu agama ataupun tidak memiliki agama, melainkan menjadikan urusan keagamaan adalah urusan *privat* yang dikelola oleh masing-masing individu di Singapura. Singapura berupaya untuk menjaga ajaran maupun iman tanpa melukai perasaan orang lain yang berbeda dengannya. Lebih jelasnya Singapura adalah negara sekuler, yang tidak menempatkan agama sebagai urusan resmi yang harus dikelola oleh negara, melainkan mengawasi paham keagamaan ketika mengancam stabilitas negara.

Tentu hal ini bukan tidak beralasan, Singapura memiliki catatan sejarah yang kelam terkait pertikaian etnis dan agama yang terjadi dinegara ini. Setidaknya ada tiga kasus konflik berbau keagamaan yang menjadikan Singapura menjadi negara yang berpahan sekulerisme. Di tahun 1950 dikenal dengan kasus Maria Hertogh, kasus ini terjadi akibat perbedaan etnis yang menimbulkan konflik, antara ibu kandung yang Katolik Belanda dengan ibu angkat Melayu Muslim. Kasus ini juga diboncengi dengan isu politik yang saat itu anti kolonial, sehingga semakin membuat kasus ini runyam hingga mengakibatkan 18 orang tewas dan 173 orang luka-luka. Kasus selanjutnya ditahun 1964 dimana sekumpulan pemuda beretnis China melempari muslim yang sedang merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kerusuhan ini mengakibatkan sebanyak 22 orang meninggal dan 454 orang cedera. Dan kasus ketiga adalah kasus yang lebih berbau politik yang didalamnya menyangkut keagamaan. Kasus ini terjadi ditahun 1963-1965 dimana saat itu Singapura masih tergabung dalam negara Malaysia. Saat masih dalam penggabungan tersebut terdapat perbedaan yang tidak ditemukan jalan tengahnya, sehingga menjadikan pengaturan terhadap ras dan agama ditengah masyarakat negara tidak dapat diatur dan tidak ada kesepahaman antar pemimpin kedua negara.

Dari konflik-konflik tersebutlah yang membuat pemerintah Singapura memilih menjadi negara yang sekulerisme, yang memisahkan agama dari kehidupan politik dan negara. Dari pengalaman pahit tersebut pemerintah Singapura menganggap bahwa isu Agama adalah isu yang sangat sensitif dan sangat mudah menyulut ketegangan ditengah beragamnya masyarakat Singapura yang termasuk dengan negara Multikulturalismenya. Paham sekulerisme dipilih oleh Pemerintah Singapura dalam menjalankan pemerintahan dan politiknya. Hal ini tidak serta merta bagi Singapura mengharamkan keagamaan, melainkan menempatkan agama sebagai ranah privat warganya untuk menjalankan praktik keagamaan yang mereka anut dan percayai.

Pemerintah Singapura juga bukan meninggalkan begitu saja masalah keagamaan ditangan warganya. Melainkan tetap mengintervensi ataupun melibatkan diri dalam pengaturan agama di negeri singa tersebut. Pemerintah Singapura beralasan bahwa mencegah konflik keagamaan terulang kembali, maka penting bagi negara untuk tetap mengawasi keagamaan yang dijalankan oleh warganya. Lewat kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Singapura mencoba untuk tetap mengawasi keberlangsungan keagamaan di Singapura.

Pemerintah Singapura juga mengeluarkan kebijakan untuk mengatur dan mengawasi Agama melalui undang-undang, salah satunya adalah MRHA (*Maintenance of Religious Harmony Act*) ataupun undang-undang pemeliharaan harmoni agama yang diberlakukan di Singapura. Undang-undang ini bertujuan untuk memisahkan agama dan politik dalam rangka menjaga kerukunan beragama. Ada dua hal dalam upaya menciptakan kerukunan agama di Singapura; pertama, adanya pelatihan sikap dan perilaku moderat guna bertoleransi dalam hal menghindari permusuhan dan kesalahpahaman antar umat beragama. Kedua, politik dan keagamaan mutlak harus dipisahkan. Dikarenakan urusan keagamaan tidak boleh tercampur dalam kepentingan politik tertentu. Ketika partai politik diisi oleh kepentingan agama tertentu akan menimbulkan perang kepentingan antar kelompok agama hingga memunculkan ketidakstabilan politik yang berdampak pada kekacauan dalam menjalankan negara. Lumrahnya sentimen ataupun kepentingan agama dimobilisasi dalam urusan politik sehingga memberikan dampak pada negara dalam menjalankan roda pemerintahan, bermasyarakat bahkan roda perekonomian.

MRHA sendiri bagi pemerintahan Singapura adalah guna menciptakan harmonisasi ditengah-tengah masyarakat yang beragam sehingga adanya rasa nyaman dan kedamaian antar kelompok agama sehingga mencegah timbulnya kelompok-kelompok yang dapat mengganggu stabilisasi politik dan negara. Sehingga menjadikan MRHA ini adalah undang-undang yang mengawasi dan memastikan pemimpin-pemimpin agama yang ada di Singapura tidak berbeda dengan kepentingan negara dan menghilangkan pengaruh agama terhadap sistem politik yang berlaku di Singapura.

Pemerintah Singapura mengharapkan moderasi beragama bagi masyarakatnya. Perspektif moderat yang dimaksudkan oleh pemerintah Singapura adalah yang dapat berintegrasi dengan komunitas ataupun kelompok lain didalam keberagaman agama dan etnis.

Point penting terkait moderasi beragama di Singapura:

1. Seluruh rakyat Singapura menerima statusnya sebagai masyarakat sekuler.
2. Masyarakat Singapura harus memahami bahwa selain mendapatkan kebebasan bahwa ada tanggungjawab untuk menciptakan dan memelihara keamanan, kesejahteraan dan kemajuan dari sikap dan kontribusi atas harmonisasi anatar umat beragama.

3. Integrasi dan koseitas antar umat beragama harus tetap dijaga serta dipupuk, lewat toleransi, saling menghormati, dan memastikan perbedaan agama tidak menjadi sumber konflik sosial ditengah-tengah masyarakat.

Pemerintah Singapura dalam menciptakan moderasi agama juga mempertimbangkan kebijakan multikulturalisme. Multikulturalisme bertujuan untuk menjaga stabilisasi sosial dan asimiliasi warga Singapura. Multikulturalisme bagi Benjamin adalah ideologi yang mencoba memberikan status yang sama pada identitas maupun budaya dari berbagai ras yang terdiri dari masyarakat majemuk (Benjamin, 1976). Multikulturalisme yang didorong oleh pemerintah Singapura berdasarkan catatan kelam sejarah pertikaian yang terjadi dimasa lampau antar ras dan agama yang ada di Singapura. Pemerintah lewat kebijakan multikulturalisme memberikan dasar yang sama bagi setiap warganya ditengah-tengah masyarakat maupun dihadapan negara. Kebijakan ini mengharapkan menghilangnya kekerasan antar etnis maupun agama serta menimbulkan rasa kebersamaan yang terinterpretasi adanya interaksi sosial dan terikat satu sama lain dikalangan warga Singapura. Multikulturalisme juga menjadi kontrol sosial yang mampu menciptakan rasa nyaman antar warga Singapura dalam kehidupan bermasyarakat. Rasa adil dan setara juga diharapkan muncul dengan dijalankannya kebijakan multikulturalisme, hal-hal inilah yang diharapkan untuk mengurangi gesekan-gesekan dan konflik-konflik sosial ditengah kehidupan warga Singapura yang beragam.

pemerintah Singapura lewat multikulturalisme berusaha untuk mempertahankan dan memperkuat ras-ras, dan etnis unik yang ada di negaranya serta menjadikan hal tersebut sebagai *sense of identity*. Dalam menyederhanakan etnis yang beragam di Singapura dibuatlah kebijakan CMIO (China, Melayu, India and Others) yang mana setiap warga negara Singapura akan mengidentifikasi dirinya sebagai salah satu dari empat ras tersebut sebagai identitas dirinya (Chuang). "here is a society that is very determined to be a secular state, but one that is deeply diverse in religion and ethnicity and in order to achieve that secular goal it must manage its religious hinteland" (Nasir, 2010). Pendapat Nasir ini menunjukkan walaupun negara Singapura adalah negara yang berideologi sekuler, tidak serta merta membiarkan kebebasan beragama langsung ada di masyarakatnya. Manajemen keagamaan masih menjadi perhatian yang penting bagi pemerintah yang mengaku dirinya sekuler. Sifat kehidupan keagamaan yang fluktuatif dan dinamis menjadikan kontrol terhadap keagamaan tetap menjadi *concern* penting bagi negara dalam memastikan ranah agama tidak mencampuri urusan kenegaraan dan perpolitikan terlebih menciptakan konflik dan gesekan ditengah-tengah masyarakat.

Pemerintah Singapura dalam melakukan manajemen urusan keagamaan contohnya menentukan organisasi formal maupun informal dalam menjalankan

pengelolaan agama ditengah-tengah masyarakatnya. Setidaknya penentuan ataupun Kooptasi bagi organisasi keagamaan yang dijalankan pemerintah Singapura bertujuan untuk; pertama, memastikan pengelolaan agama di Singapura sehingga menjamin stabilitas sosial yang ada di Singapura.

Pereira menjelaskan bahwa negara Singapura sebuah negara Sekuler secara konstitusi memisahkan agama dari urusan politik dimana agama adalah urusan pribadi masing-masing warga negara. Hal ini juga mengindikasikan bukan berarti pengalaman agama tidak dibenarkan melainkan bahwa Singapura sebagai negara tidak memiliki agama resmi, masyarakat bebas memilih agama dan kepercayaannya masing-masing (Pereira, 2005). Namun apapun yang terjadi pemerintah Singapura tidak serta merta bisa melepas pengaturan agama. Pemerintah Singapura mengatur urusan keagamaan dikarenakan pemerintah Singapura tidak bisa menafikkan bahwa agama memiliki peranan penting dalam menciptakan moral dan adab warga dalam bernegara yang baik. Sehingga menjadikan pemerintah Singapura tetap memberikan ruang bagi organisasi atau lembaga keagamaan untuk menjalankan keagamaan di negeri Singapura. Esensi dari apa yang dilakukan pemerintah Singapura adalah mendorong masyarakatnya untuk menjalankan spiritualitas dan pengalaman keagamaan seluas mungkin tanpa mengancam ataupun mengganggu stabilitas politik dan negara Singapura.

Singapura sendiri menganut model “accommodative secularism” yang berupaya mengelola keseimbangan agama ditengah berbagai kelompok agama (Thio, 1999). Pengadilan juga menyatakan “accommodative secularism” berhubungan dengan perlindungan konstitusi atas kebebasan beragama atas dasar pikiran “menghapus pembatasan untuk memilih satu agama yang diyakini”(Nappali, 1999). Pemilihan agama secara individual menunjukkan sikap kolaborasi dengan perlakuan kesetiaan pada agama serta keseimbangan dibawah model yang ditentukan. Model ini membuat agama harus toleran dan membutuhkan sikap pluralisme dalam bernegara.

Di Singapura kelompok agama dilihat sebagai faktor positif dengan mereka tidak terlibat didalam politik dan fokus pada energi ataupun usaha dalam kesejahteraan sosial. Pemerintah Singapura mendorong aktivitas ini sebagai bentuk representasi kepentingan privat, dimana sejalan dengan apa yang diinginkan pemerintah anti kebijakam kesejahteraan (*welfarism*) atau menyediakan sumber daya untuk pemerintah gunakan(Thio). Salah satu contoh moderasi beragama di Singapura adalah bagaimana umat muslim sebagai minoritas menerima bahwa adzan tidak diperbolehkan dikumandangkan lewat pengeras suara melainkan melalui radio, sehingga warga lain yang tidak beragama islam tidak terganggu dengan suara adzan. Kondisi Singapura yang seperti ini menjadi menarik bagaimana moderasi keagamaan berlangsung di Singapura, yang menggambarkan bagaimana masyarakat Singapura diberikan ruang dalam beragama

dan menciptakan keharmonisan ditengah keberagaman yang didalamnya terdapat keberagaman keagamaan.

Pemerintah Singapura menjalankan kebijakan yang mencoba membaurkan keberagaman masyarakatnya. Kebijakan *New Strait Settlement* adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Singapura untuk mendukung upaya ini. Hal ini upaya untuk mengasimilasi dan mengintegrasikan masyarakatnya ditengah arus migrasi global yang ada di Singapura. Rumah susun adalah tempat tinggal yang diwajibkan oleh negara Singapura terhadap penduduknya. Hingga sekarang setidaknya 85% penduduk Singapura menempati rumah susun sebagai tempat tinggalnya (Chuang, 2002). Uniknya pemerintah Singapura memiliki hitungan yang strategis agar upaya ini dapat berjalan terukur. Pemerintah Singapura menetapkan sistem kuota pada setiap komplek rusun yang akan ditinggali oleh berbagai etnis yang ada di Singapura, seperti Cina, Melayu india dan etnis lain yang ada. Rumah susun dijadikan pemerintah Singapura untuk mempertemukan berbagai etnis warganya agar dapat hidup berdampingan sehingga perlahan menjadikan masyarakat Singapura yang moderat.

Singapura dengan Sekulerismenya tentu tidak bisa memasukkan pelajaran keagamaan pada kurikulum sekolah yang akan diajarkan kepada siswa-siwa mereka. Pendidikan agama tidak dimasukkan dalam ruang pendidikan nasional, melainkan diserahkan secara penuh pada masing-masing individu dalam mempelajari, memperdalam dan menjalankan praktik keagamaannya masing-masing. Namun bukan berarti pendidikan keagamaan sama sekali tidak ada tempat dalam sejarah pendidikan Singapura, di tahun 1984 pemerintah Singapura pernah menawarkan kepada masyarakatnya untuk mempelajari tiga pendidikan agama yaitu Kristen, Budha maupun Islam. Siswa dibebaskan untuk memilih satu pendidikan Agama yang ditawarkan tersebut, namun sesuai bagaimana konsep negara Singapura dijalankan yang sekuler, maka pendidikan agama dihapuskan dari pendidikan nasional Singapura dan dikembalikan keranah individu masing-masing untuk memenuhi pembelajaran keagamaan yang mereka butuhkan (Belajar dari Cara Singapura Memperlakukan Agama” dalam Detikforum, Politik dan Peristiwa Sosial Budaya, 13 Agustus 2014. Diakses dari <http://forum.detik.com/belajar-dari-carasingapore-memperlakukan-agama-t1001623.html>). Sehingga menjadikan keagamaan bukan persoalan yang harus dikelola oleh negara lewat sistem pendidikan formal yang ada disekolah-sekolah yang ada di Singapura.

## **KESIMPULAN**

Moderasi beragama antara Indonesia dan Singapura memiliki kemiripan, dimana setidaknya ada dua hal kemiripan yang tampak. Pertama, baik Indonesia dan Singapura bukanlah negara yang menjadikan agama sebagai konstitusi ataupun landasan negara, tetapi memberikan akses kepada masyarakatnya untuk menjalankan ritual keagamaannya masing-masing, sepanjang tidak mencederai

keharmonisan bernegara. Kedua, “moderasi beragama” di kedua negara baik Indonesia dan Singapura sama-sama ada campur tangan pemerintah, dimana masing-masing negara memiliki kebijakan untuk menumbuhkan moderasi beragama di negaranya masing-masing, mengingat baik Indonesia dan Singapura adalah dua negara di kawasan Asia Tenggara yang kemajemukan dan pluralism yang tinggi. Sehingga keterlibatan pemerintah dalam keagamaan di masing-masing negara adalah memastikan perilaku keagamaan tidak menimbulkan gesekan dan konflik yang mengakibatkan terganggu kestabilan negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Administration of Muslim Act, (Cap3), 1999 Revised Edition.
- Alexius A Pereira, Religiosity and Economic development in Singapore, *Journal of Contemporary Religion*, Volumen 20, No.2, 2005. Hl, 161-178.
- Ardhi, Agung Wiyat S. 2013. *Jejak Sejarah, Kedatangan Islam di Keramas, Ngiring Ida I Gusti Agung*. Gianyar: Bhadraka Ashrama Puri Anyar Keramas.
- Crowther, M., Lim, W., & Crowther, M. A.. Systematic review and meta-analysis methodology. *Blood*, 116(17), (2010).3140–3146.
- Chua Beng Huat, *Political Legitimacy and Housing, Stake holding in Singapore*, New York: Taylor & Francis e-Library, 2002
- Effendy, B. (1998). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Paramadina
- Institut, s. (2019). *Setara Institute:97 Kasus Penistaan Agama terjadi di Indonesia. Setara Institut*.<https://setara-institute.org/setara-intitute-97-kasusu-penistaan-agama-terjadi-di-indonesia/>
- Kamaludeen Mohammed Nasir, *Muslims in Singapore: Piety, Politics dan Policies* (New York : Routhledge, 2010).
- Makbuloh, Deden. 2013. *Pendidikan Agama Islam Arah Baru Pengembangan Ilmu dan Kepribadian di Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Nappali Peter Williams v Institute of Technical Education (1999) 2 SLR 569 at 576G(Court of Appeal).
- On Singapora welfare policy, see Thio Li-ann;*supra*, note 36 at 81-83
- Rowley, D. J., & Slack, D. F. Conducting a Literature Review. *Management Research News*, 27(6), (2004). 31–39.
- Sa’dun M,M. (1999). Pengantar Editor, In M.S.M. (Ed), *Pri-nonPri: Mencari Format Baru Pembaruan*. PT Pustaka CIDESINDO
- Tan, Eugene K.B. 2007. “Noming moderation in an iconic target : Public policy and the regious anxieties in Singapore” *Terrorism and Political Violence* 19 (4): 443-462
- Thio Li-ann “ The Secular Trumps The Sacred: Constitutional Issues Arising out of Collin Chan PP (1995) *Singapore Law Review* 26 Hlm 36.

Widya Winayata. 2022. Masyarakat Islam Kampung Sindu Di Desa Keramas, Gianyar, Bali: Sejarah Integrasi Sosial, Dan Potensinya Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah di SMA. *Jurnal Pendidikan Sejarah* Vol. 10 NO. 02

Belajar dari Cara Singapura Memperlakukan Agama” dalam Detikforum, Politik dan Peristiwa Sosial Budaya, 13 Agustus 2014. Diakses dari <http://forum.detik.com/belajar-dari-carasingapore-memperlakukan-agama-t1001623.html>.

Pratomo, A.Y. (2016). Perjalanan panjang pasal penistaan agama di Indonesia. *Merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/Peristiwa/perjalanan-panjang-pasal-penistaan-agama-di-indonesia.html>.

<https://www.worldometers.info/world-population/singapore-population/>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/penduduk-indonesia-tembus-278-juta-jiwa-hingga-pertengahan-2023#:~:text=Menurut%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,on%20Year%2Fyoy>).

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>.

[https://www.liputan6.com/islami/read/4266133/10-masjid-bercorak-tionghoa-di-indonesia-unik-dan-khas#google\\_vignette](https://www.liputan6.com/islami/read/4266133/10-masjid-bercorak-tionghoa-di-indonesia-unik-dan-khas#google_vignette)

<https://travel.kompas.com/read/2019/12/26/180400427/indahnyatoleransi-masjid-istiqlal-dan-gereja-katedral>

<https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/4-contoh-konflik-antar-agama-yang-pernah-terjadi-di-indonesia-20YvBIQA43W/2>